

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF MARITIME VALUES IN THE DJUANDA DECLARATION MATERIAL

ANALISIS WACANA KRITIS NILAI-NILAI MARITIM PADA MATERI DEKLARASI DJUANDA

Siska Amelia^{1*}, Leli Yulifar²

¹² Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia

^asiskaamelia99@upi.edu

^bleli_yulifar@upi.edu

(*) Corresponding Author

siskaamelia99@upi.edu

How to Cite: Siska Amelia. (2024). Analisis Wacana Kritis Nilai-Nilai Maritim Pada Materi Deklarasi Djuanda. doi: 10.36526/js.v3i2.4922

Received : 02-08-2025
 Revised : 05-08-2025
 Accepted: 12-08-2025

Keywords:
 Critical Discourse
 Analysis, Maritime
 Values, Djuanda
 Declaration

Abstract

This article aims to describe critical discourse analysis of the Djuanda Declaration material in the 2013 revised 2018 Indonesian History book through a qualitative descriptive approach. This approach uses Teun A. Van Dijk's critical discourse analysis model which includes three dimensions, namely dimension 1) text (macrostructure, superstructure and microstructure); 2) social cognition; and 3) social context. The results of this research show that the material text of the Djuanda Declaration, which is published in the 2018 revised 2018 History of Indonesia book, provides information about efforts to protect Indonesia's territorial sea boundaries and the benefits for Indonesia, namely being able to unite Indonesia's territories and the natural resources of the sea can be utilized optimally.

PENDAHULUAN

Pembelajaran sejarah di Sekolah merupakan proses kegiatan yang dilakukan siswa bersama guru dalam upaya memahami materi sejarah yang didapatkan dari berbagai sumber. Proses pembelajaran sejarah mengandung nilai-nilai yang bermanfaat dalam meningkatkan kecerdasan, mendukung pengembangan karakter siswa. Melalui pembelajaran sejarah, siswa diarahkan untuk membangun kepribadian yang positif dengan mengambil pelajaran berharga dari peristiwa masa lalu sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beberapa tujuan pembelajaran sejarah diantaranya: Pertama, mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri. Kedua, mengajarkan prinsip moral. Ketiga, mengajarkan toleransi. Keempat, memperkuat rasa nasionalisme (Kocchar, 2008).

Pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang tujuannya memiliki kaitan dengan pembentukan watak bangsa. Tujuan tersebut membuat tujuan pelajaran sejarah akan berkaitan dengan ideologi politik kenegaraan. Negara memiliki kewajiban membentuk watak kebangsaan yang dilakukan melalui pendidikan, salah satunya dengan mata pelajaran sejarah, yaitu melalui buku teks sejarah. Kewajiban negara tersebut diimplementasikan melalui kebijakan pendidikan kurikulum. Buku teks pelajaran pada hakikatnya merupakan penjabaran isi kurikulum secara operasional (Sitepu, 2012: 27).

Dalam kurikulum 2013 uraian materi yang tersaji dalam buku teks merupakan pengembangan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam kurikulum. Dalam Kurikulum 2013, pembelajaran menempatkan kompetensi spiritual pada Kompetensi Inti 1 dan kompetensi sosial sebagai Kompetensi Inti 2 kemudian diikuti aspek pengetahuan yang terdapat pada Kompetensi Inti 3 dan

keterampilan yang terdapat pada Kompetensi Inti 4. Dalam hal ini pemerintah melalui implementasi Kurikulum 2013 mewacanakan pendidikan karakter melalui pembelajaran

Buku teks merupakan sumber belajar bagi peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Penulisan buku teks pelajaran sejarah untuk pendidikan di sekolah pada hakekatnya merupakan bagian dari perkembangan historiografi di Indonesia. Namun pembelajaran yang ada dalam buku teks harus memberikan pesan bahwa dari sebuah tema dapat memberikan pengetahuan, penguatan nilai-nilai, tidak hanya konsep, teori dan strukturisasi. Nilai-nilai dari peristiwa bangsa harus dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan di lingkungan.

Dalam upaya mengungkap nilai-nilai dalam buku teks sejarah perlu digunakan sebuah pendekatan yaitu analisis isi. Analisis isi diawali mengidentifikasi wacana tema-tema, baik kata, kalimat sehingga potongan tersebut memberikan sebuah hasil analisis bermuatan nilai-nilai dalam buku sejarah. Setelah menghasilkan analisis dalam buku teks sejarah maka dihubungkan ke dalam konteks lingkungan.

Analisis wacana harus sejalan dengan konteks lingkungan sosial masyarakat sehingga menghasilkan sebuah struktulisasi analisis yang logis. Struktulisasi analisis yang dimaksud adalah struktur makro dan mikro. Struktur makro dan mikro digunakan untuk mengidentifikasi kalimat yang berkaitan sehingga dapat diuraikan ke superstruktur dan menghasilkan narasi nilai-nilai maritim, selanjutnya hasil nilai-nilai maritim dihubungkan ke dalam konteks lingkungan sosial masyarakat.

Pada materi Kelas XII dengan Kompetensi Dasar Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis wacana kritis dari Teun Van Dijk yang terdiri dari tiga tahap. Pendekatan ini menggunakan model analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk meliputi tiga dimensi. Adapun tahapan dalam penelitian ini, yakni langkah awal dilakukan dengan melakukan studi literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya melakukan analisis wacana kritis dengan menerapkan model Teun A. Van Dijk dengan tahapan analisis teks, kognisi sosial, dan terakhir konteks sosial. Setelah diperoleh hasil analisis, dilakukan penarikan simpulan. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis ini, analisis akan difokuskan pada aspek kebahasaan dan konteks-konteks yang terkait dengan aspek tersebut.

Kuntoro (2008: 45) dalam tulisannya menjelaskan mengenai model analisis wacana yang terdiri dari tiga hal penting yang mempengaruhi produksi maupun analisis wacana, yakni: ideologi, pengetahuan, dan wacana. Ideologi mempengaruhi produksi wacana. Tidak ada wacana yang benar benar netral atau steril dari ideologi penutur atau pembuatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembelajaran Sejarah, hingga saat ini masih belum terdapat Kompetensi Dasar ataupun Capaian Pembelajaran secara khusus yang mengulas mengenai Sejarah kemaritiman. Namun dengan adanya materi pembelajaran sejarah mengenai peradaban dunia, penyebaran agama, penjelajahan dunia ataupun penetapan batas wilayah territorial Indonesia maka sejarah kemaritiman telah dapat diimplementasikan dalam pembelajaran sejarah.

Pentingnya aspek kemaritiman da lam masyarakat Indonesia yang tertuang dalam sejarah maritim pada dasarnya memiliki relevansi dalam pelajaran sejarah di sekolah. Beberapa aspek dominan dari kajian maritim yang terintegrasi dengan struktur kurikulum terutama da lam aspek (1) perniagaan, (2) pelayaran dan eksplorasi, (3) persilangan budaya dan inkorporasi gagasan, (4) peperangan dan perlawanan, dan (5) penguasaan wila yah dan politik kelautan (Ahmad, 2017).

Menurut Sulistiyono (2008), mempelajari sejarah kemaritiman terutama pada jenjang SD hingga SMA dapat menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat khususnya para pelajar sebagai generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai budaya maritim pada masa lampau untuk pembangunan Indonesia baru sebagai negara bahari yang kuat dan tangguh.

Nilai kemaritiman dalam Sejarah Indonesia dapat menjadi landasan dan jati diri Indonesia. Pada hakikatnya, sejarah dapat meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan sebab akibat antara masa lampau dengan saat ini. Mempelajari sejarah maritim Indonesia dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap sejarah maritim sehingga dapat terbangun kepribadian, sikap dan pemahaman yang mendalam tentang kegunaan laut sebagaimana yang telah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu.

Dengan demikian sejarah maritim memiliki arti penting dalam membangun identitas nasional bangsa Indonesia. Maka atas dasar hal tersebut, penulis mencoba untuk mengkaji nilai-nilai kemaritiman yang terdapat pada Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas XII revisi 2018.

Upaya mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia tertuang pada Kompetensi Dasar 3.4. Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Pada masa Indonesia modern, lautan tetap menjadi sumber penghidupan dan sekaligus perekat kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran sentralitas posisi wilayah Maritim Indonesia bagi kesejahteraan dan kedaulatan mendorong dikeluarkannya Deklarasi Djuanda pada masa Demokrasi Liberal. Deklarasi ini mengkonstruksi satu wawasan kemaritiman Indonesia modern. Wawasan ini dikenal sebagai wawasan Nusantara.

Tema yang akan dianalisis dalam Buku teks Sejarah Indonesia kelas XII revisi 2018 adalah pada BAB II Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959). Adapun sub bab yang dikaji adalah Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal yang difokuskan pada materi Deklarasi Djuanda yang terdapat pada halaman 62-64. Materi mengenai Deklarasi Djuanda juga terdapat pada BAB VI Indonesia Dalam Panggung Dunia dengan sub bab Deklarasi Djuanda yang terdapat pada halaman 244-249.

Berikut ini merupakan identitas buku Sejarah Indonesia yang akan dianalisis yaitu

Judul : Sejarah Indonesia untuk SMA/MA Kelas XII revisi 2018
 Penyusun : Abdurakhman, Arif Pradono, Linda Sunarti dan Susanto Zuhi
 Penelaah : Baha' Uddin, Hariyono, dan Mohammad Iskandar
 Pe Review : Djulimi Tandjung
 Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud
 Tahun terbit: 2018
 Kurikulum : Kurikulum 2013
 Kelas : XII

Dengan menggunakan analisis wacana Teun Van Dijk dalam dimensi makro, mikro dan superstruktur maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 1. Struktur Analisis Wacana Teun Van Dijk dalam Materi Deklarasi Djuanda

Struktur Wacana	Hal yang diamati	Elemen
Struktur Makro	TEMATIK Identifikasi dan analisis Maritim	Topik
Superstruktur	SKEMATIK (Bagaimana pendapat disusun dan dirangkai pada buku teks)	Skema (Judul)

Struktur Mikro	SKEMANTIK (Makna yang ingin ditekankan dalam wacana maritim)	<i>Latar</i> Keterikatan maritim dengan peristiwa sejarah
	SINTAKSIS Bagaimana pendapat memahami	Memahami maritim dengan kajian analisis wacana
	RETORIS Penekanan dalam pendekatan wacana maritim	Grafis atau Ekspresi, Metafora

1. Dimensi Teks

Pada dimensi teks hal yang dianalisis adalah bagaimana strategi wacana yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu. Teun A. Van Dijk (1985) membagi dimensi teks menjadi tiga bagian, yakni struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Berikut ini akan dipaparkan lebih lanjut hasil dan pembahasan dimensi teks pada teks Deklarasi Djuanda pada Buku Teks Sejarah Indonesia kelas XII Kemendikbudristek revisi 2018.

a. Struktur Makro

Struktur makro merupakan bagian global suatu teks. Tema utama adalah upaya memperjuangkan batas laut wilayah Indonesia melalui Deklarasi Djuanda. *Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah RI mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 dan Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Karena pernyataan tersebut dilakukan pada masa Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaya maka lebih dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.*

Deklarasi Djuanda adalah kedaulatan negara kepulauan. Wacana ini bertujuan untuk *menegaskan* bahwa perairan antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari wilayah nasional. Dengan demikian, tema ini menonjolkan aspek integritas dan kesatuan negara.

b. Superstruktur

Struktur teks Deklarasi Djuanda disusun secara formal dengan menyampaikan aspek historis dari penetapan kedaulatan bangsa Indonesia. Pada buku teks Sejarah Indonesia kelas XII halaman 244-245 terdapat wacana bahwa *pada abad ke-20, melalui Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 (Staatsblad 1939 No. 422) atau yang biasa disingkat dengan Ordonantie 1939, wilayah laut dalam suatu pulau di Nusantara memiliki ketetapan hukum yang diakui secara internasional. Ordonantie 1939 menetapkan bahwa jarak laut teritorial bagi tiap-tiap pulau sejauh tiga mil. Adapun isi utama dari teks tersebut berisi mengenai Sejarah penetapan luas wilayah laut Indonesia sejak masa colonial sampai dikeluarkannya Deklarasi Djuanda.* Penutup dari teks tersebut menggarisbawahi pentingnya pengakuan internasional terhadap klaim ini.

c. Struktur Mikro

Struktur mikro melihat mengenai makna yang ingin ditekankan dalam wacana maritim. Pada teks Deklarasi Djuanda terdapat diksi kata-kata seperti "*kedaulatan*", "*kesatuan*", dan "*wilayah*", memperkuat semangat nasionalisme.

2. Dimensi Kognisi Sosial

Dimensi ini membahas bagaimana pengetahuan, ideologi, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh aktor-aktor dalam wacana mempengaruhi pembentukan teks. Adapun ideologi yang muncul dalam teks ini adalah ideologi nasionalisme. Deklarasi ini dipengaruhi oleh ideologi nasionalisme yang kuat. Pemimpin Indonesia pada masa itu, termasuk Ir. Djuanda, memiliki visi untuk menjaga integritas

wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tercermin dalam upaya untuk memperjuangkan pengakuan internasional terhadap konsep negara kepulauan.

Selain itu pada dimensi kognisi sosial terdapat representasi bangsa Indonesia dan representasi dunia internasional. Representasi diri (Indonesia): Indonesia digambarkan sebagai negara yang sah untuk mengklaim kedaulatan atas seluruh perairan di antara pulau-pulau karena faktor geografis, historis, dan budaya.

Pada halaman 247 terdapat teks dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka Ordonantie 1939 sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, dan garis teritorial laut Indonesia yang sebelumnya 3 mil menjadi 12 mil. Namun, tidak lama setelah Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut, muncul beberapa reaksi terhadap peraturan tersebut. Reaksi protes datang dari beberapa negara seperti dari Amerika Serikat (tanggal 30 Desember 1957), Inggris (3 Januari 1958), Australia (3 Januari 1958), Belanda (3 Januari 1958), Perancis (8 Januari 1958), dan Selandia Baru (11 Januari 1958). Reaksi penolakan tersebut sudah dipikirkan oleh pemerintah Indonesia, dan sudah pula diumumkan bahwa reaksi-reaksi dari berbagai negara tersebut akan diperhatikan dan dibahas dalam konferensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan pada 1958 di Jenewa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah siap dengan reaksi protes yang diajukan dan siap berdebat pada konferensi di Jenewa.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses perjuangan mempertahankan kedaulatan terdapat pertentangan dari dunia internasional (khususnya negara-negara dengan kepentingan maritim) digambarkan sebagai pihak yang harus memahami dan menerima posisi Indonesia.

3. Dimensi Konteks Sosial

Dimensi ini mengkaji hubungan antara wacana dan struktur sosial, terutama terkait dengan kekuasaan dan dominasi.

Struktur Kekuasaan Deklarasi Djuanda adalah alat untuk memperkuat kekuasaan Indonesia atas wilayah perairannya. Dalam konteks ini, Indonesia berusaha menggeser narasi hukum laut internasional yang saat itu lebih menguntungkan negara-negara maritim besar. Wacana ini menantang hegemoni negara-negara maju yang memanfaatkan celah hukum laut untuk mengakses perairan di antara pulau-pulau Indonesia.

Deklarasi ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam hukum laut internasional yang tidak memihak pada negara-negara kepulauan. Indonesia menghadapi tantangan besar untuk mengubah pandangan internasional melalui diplomasi intensif, yang akhirnya terwujud dalam pengakuan konsep negara kepulauan di UNCLOS 1982.

Deklarasi ini berdampak luas dalam membentuk identitas bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Selain itu, deklarasi ini juga menciptakan nilai maritim yang bermuara politik bagi negara kepulauan lain untuk memperjuangkan kedaulatan wilayahnya.

PENUTUP

Dengan menggunakan analisis wacana Teun van Dijk, Deklarasi Djuanda dapat dipahami sebagai wacana yang dirancang untuk merekonstruksi kekuasaan dan legitimasi Indonesia di panggung internasional. Teks menunjukkan nasionalisme melalui struktur, pilihan kata, dan tema integritas wilayah. Kognisi sosial mencerminkan ideologi nasionalisme dan kesadaran kolektif bangsa terhadap pentingnya kedaulatan. Konteks sosial menunjukkan upaya melawan dominasi negara-negara besar dalam hukum laut dan memperjuangkan keadilan bagi negara kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurakhman, dkk. 2018. *Sejarah Indonesia untuk SMA/MA/SMK Kelas XII*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Ahmad, T. A. (2017). Urgensi dan Relevansi Pembelajaran Sejarah Maritim untuk Wilayah Pedalaman. *Paramita: Historical Studies Journal*, 27(1), 113-126. DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/paramita.v27i1.9190>.
- Andriani, Ayu. 2018. *Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku*. Sukabumi : CV Jejak
- Kocchar, S.K. 2008. *Pembelajaran Sejarah*. Jakarta : Grasindo
- Kuntoro. (2008). Analisis Wacana Kritis (Teori Van Dijk Dalam Kajian Teks Media Massa). *Leksika Vol.2* (2) hlm. 45-55.
- Lapian, A.B. 2008. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara abad ke-16 dan 17*. Depok: Komunitas Bambu.
- Loy, Nicholas. 2021. *Mengamankan Laut Tata Ruang dan Keamanan Maritim*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. 2014. Diakses 1 Oktober 2016 dalam [http:// www.kemlu.go.id/id/berita/siaran_pers/Pages/Presiden-Jokowi- Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx](http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran_pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx).
- Ratnaningsih, D. (2019). Analisis Wacana Kritis Sebuah Teori dan Implementasi. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Rahayu, Sri Tutie. 2023. *Pendidikan Maritim : Kunci Pengembangan SDM Unggul di Era Industri 4.0*. Yogyakarta : Jejak Pustaka
- Sitepu, B.P. (2012). *Penulisan Buku Teks Pelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sulistiyanto.2023. *Membangun Generasi Emas Bangsa Berkarakter Bela Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Sulistiyono, S. T. (2016). Paradigma Maritim dalam Membangun Indonesia: Belajar dari Sejarah. *Lembaran Sejarah*, 12(2), 81-108.